



# JURNAL RISET AKUNTANSI

Volume VIII/No.1/April 2016

ISSN: 2086-0447

PENGENDALIAN SISTEM MATERIAL HANDLING PADA INDUSTRI MANUFAKTUR MODERN

**Ning W.**

PENGARUH MANAJEMEN ASET TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN DAN KOTA DI JAWA BARAT

**Ony Widilestariningtyas  
Ginangjar**

PENGARUH EFEKTIFITAS PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD PADA TELKOM FOUNDATION

**Fitroh Nurani  
Evi Octavia**

ANALISIS *CAPITAL ADEQUACY RATIO* (CAR) PENGARUHNYA TERHADAP KREDIT YANG DIBERIKAN (STUDI KASUS PADA PT. BANK PERMATA TBK. YANG TERDAFTAR DI BEI)

**Wati Aris Astuti  
Noneng**

ANALISIS TERHADAP SURAT TAGIHAN PAJAK DAN PENERIMAAN PAJAK PADA KPP PRATAMA BANDUNG TAHUN 2009-2013

**Adeh Ratna Komala  
Dewi Eka Apriliyani S.**

POLA KEMITRAAN DAN PRODUK PEMBIAYAAN SYARIAH USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH SEKTOR AGRIBISNIS

**Sri Dewi Anggadini**



PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI

**UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA**

JL.Dipatiukur 112-114 Bandung 40132 Telp.022-2504119, Fax. 022-2533754

Email : [akuntansi@email.unikom.ac.id](mailto:akuntansi@email.unikom.ac.id)

**SUSUNAN TIM  
JURNAL RISET AKUNTANSI**

**PELINDUNG**  
REKTOR UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA

**PENASEHAT**  
PEMBANTU REKTOR UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA

**PEMBINA**  
DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA

**KETUA TIM REDAKSI**  
Dr. Siti Kurnia Rahayu, SE., M.Ak., Ak., CA..

**PENYUNTING AHLI**  
**Ketua:**  
Prof. Dr. Dwi Kartini., SE., Spec., Lic

**Anggota:**

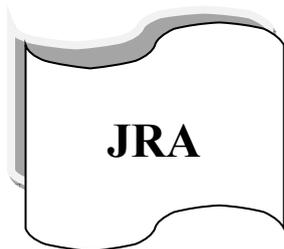
Prof. Dr. Hj. Ria Ratna Ariawati, SE.MS., Ak	(Universitas Komputer Indonesia Bandung)
Prof. Dr. Soekrisno Agoes, Drs., Ak	(Universitas Tarumanagara Jakarta)
Dr. H. Deddy Supardi, SE., M.Si., Ak	(Universitas Sangga Buana Bandung)

**TIM EDITING**  
Sri Dewi anggadini, SE., M.Si., Ak.  
Adi Rachmanto, S.Kom., M.Kom.

**TATA USAHA**  
Sekretariat Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

**ALAMAT PENYUNTING DAN REDAKSI:**  
Program Studi Akuntansi  
Jl. Dipati Ukur 112-114 Bandung 40132  
Tlp 022. 2504119, fax (022) 2533754  
e-mail: [akuntansi@email.unikom.ac.id](mailto:akuntansi@email.unikom.ac.id)





## KEBIJAKAN EDITORIAL

Jurnal Riset Akuntansi, diterbitkan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Komputer Indonesia Bandung secara berkala (Setiap enam bulan sekali) dengan tujuan untuk menyebarkan informasi hasil riset akuntansi kepada para akademisi, praktisi, mahasiswa, dan lain-lain meliputi bidang : Akuntansi, Bisnis, dan Manajemen.

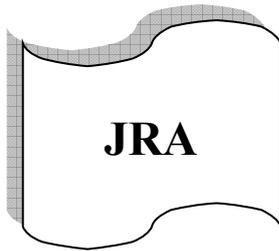
Jurnal riset akuntansi menerima kiriman artikel hasil riset akuntansi dan manajemen yang ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris. Penulis harus menyatakan bahwa artikel yang dikirim ke jurnal riset akuntansi tidak dikirimkan atau telah dipublikasi dalam jurnal yang lain. Untuk artikel hasil riset dengan pendekatan survey atau eksperimental, penulis harus melampirkan instrumen riset (Kuesioner, kasus, daftar wawancara, dan lain-lain). Agar hasil riset bisnis dan manajemen yang dimuat dalam jurnal riset akuntansi dapat bermanfaat untuk pengembangan praktik, pendidikan dan riset akuntansi, penulis artikel berkewajiban memberikan data riset kepada yang memerlukannya dan memberikan informasi cara memperoleh data tersebut.

Penentuan artikel yang dimuat dalam jurnal riset akuntansi melalui proses blind review oleh jurnal riset akuntansi, dengan mempertimbangkan antara lain : terpenuhinya persyaratan baku publikasi jurnal, metodologi riset yang digunakan, dan signifikansi kontribusi hasil riset terhadap pengembangan profesi dan pendidikan akuntansi dan manajemen. Editor bertanggung-jawab untuk memberikan telaah konstruktif, dan jika dipandang perlu, menyampaikan hasil evaluasi kepada penulis artikel. Artikel dikirim ke editor jurnal riset akuntansi dengan alamat :

### **Ketua Editor**

Prof. Dr. Dwi Kartini., SE.,Spec.,Lic  
Gedung Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Kampus IV, Lantai 3  
Jl. DipatiUkur No. 112-114 Bandung 40132  
Telp. (022) 2504119, Fax. (022) 2533754  
Email : akuntansi@email.unikom.ac.id





## PEDOMAN PENULISAN ARTIKEL

Berikut Ini adalah pedoman penulisan artikel dalam Jurnal Riset Akuntansi yang diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi penulis.

1. Sistematika pembahasan dalam artikel setidaknya terdiri atas bagian-bagian sebagai berikut :
  - Abstrak** bagian ini memuat ringkasan riset, antara lain mengenai : masalah riset, tujuan, metode, temuan, dan kontribusi hasil riset. Abstrak disajikan di awal teks dan terdiri antara 150 s/d 200 kata (sebaiknya disajikan dalam bahasa inggris). Abstrak diikuti dengan tiga kata kunci (*keywords*) untuk memudahkan penyusunan indeks artikel.
  - I. **Pendahuluan** menguraikan latar belakang penelitian, rumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, kegunaan penelitian.
  - II. **Kajian pustaka**, kerangka pemikiran dan hipotesis memaparkan kajian pustaka berdasarkan telaah literature yang menjadi landasan logis untuk mengembangkan kerangka pemikiran dan hipotesis atau proposisi riset dan model riset (jika dipandang perlu).
  - III. **Objek dan metode penelitian** memuat objek penelitian menguraikan objek yang diteliti sesuai dengan judul riset dan metode penelitian yang berisi desain penelitian, operasionalisasi variable, teknik pengumpulan data, unit analisis, teknik penarikan sampel, pengujian hipotesis.
  - IV. **Hasil penelitian dan pembahasan** menguraikan hasil penelitian memuat hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan memuat analisis statistik (jika ada) dan analisis ekonomi.
  - V. **Kesimpulan dan saran** menguraikan kesimpulan penelitian dan saran berisi solusi dan kelemahan penelitian, temuan dan keterbatasan penelitian.
  - VI. **Daftar pustaka** memuat sumber-sumber yang dikutip di dalam penulisan artikel. Hanya sumber yang diacu yang dimuat di daftar referensi ini.

Lampiran memuat table, gambar, dan instrumen riset yang digunakan.

2. Artikel diketik dengan jarak baris satu spasi pada kertas A4 (21 cm x 29,7 cm). kutipan langsung yang panjang (lebih dari tiga baris) diketik dengan jarak baris satu dengan *indented style* (bentuk berinden).
3. Panjang artikel tidak lebih atas 7.000 kata (dengan Jenis huruf arial ukuran 10) atau maksimal 25 halaman.
4. Margin atas = 4 cm dan bawah, kiri dan kanan = 3 cm.
5. Halaman muka (cover) setidaknya menyebutkan judul artikel dan identitas penulis).
6. Semua halaman, termasuk table, lampiran, dan referensi harus diberi nomor urut halaman.
7. Table/gambar sebaiknya dapat disajikan pada halaman terpisah dari badan tulisan (umumnya di bagian akhir naskah). Penulis cukup menyebutkan pada bagian di dalam teks, tempat pencantuman table atau gambar.

8. Setiap tabel atau gambar diberi nomor urut, judul yang sesuai dengan isi tabel atau gambar dan sumber kutipan (bila relevan).
9. Kutipan dalam teks sebaiknya ditulis di antara kurung buka dan kurung tutup yang menyebutkan nama akhir penulis, tahun, koma, dan nomor halaman jika dipandang perlu.  
Contoh :
  - a. Satu sumber kutipan dengan satu penulis (Brownell 1981). Jika disertai nomor halaman : (Brownell 1981).
  - b. Satu sumber kutipan dengan dua penulis (Frucot dan Shearon 1991).
  - c. Satu sumber kutipan dengan lebih dari dua penulis (Gul dkk. 1995 atau Hotstede et al. 1990).
  - d. Dua sumber kutipan dengan penulis yang berbeda (Dunk 1990; Mia 1988).
  - e. Dua sumber kutipan dengan penulis yang sama (Brownell 1981, 1983) Jika tahun publikasi sama (Brownell 1982a, 1982b).
  - f. Sumber kutipan yang berasal dari pekerjaan suatu institusi sebaiknya menyebutkan akronim institusi yang bersangkutan misalnya (IAI, 1994).
10. Setiap artikel harus memuat daftar pustaka (hanya yang menjadi sumber kutipan) dengan ketentuan penulisan sebagai berikut ;
  - a. Daftar pustaka disusun alfabetis sesuai dengan nama penulis atau nama institusi.
  - b. Susunan setiap referensi ; nama penulis, tahun publikasi, judul jurnal atau buku teks, nama jurnal atau penerbit, nomor halaman.
  - c. Contoh :

American Accounting Association, Committee on Concepts and Standards for External Financial Reports. 1997. Statement on Accounting Theory and Theory Acceptance/ Sarasota, FL : AAA.

Demski, J.S., dan D.E.M. Sappington. 1989. Hierarchical Structure and Responsibility Accounting, *Journal of Accounting Research* 27 (Spring) ; 40-58.

Dye, R.; B. Balachandran; dan R. Magee. 1989. Contigent Fees for Audit Firm. Working paper, Northwestern University, Evansto, Il.

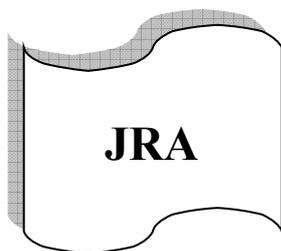
Indriantoro, N. 1993. The Effect of Participative Budgeting on Job Performance and Job Satisfaction with Locus of Control and Cultural Dimensions as Moderating Variables.Ph.D. dissertation. University of Kentucky, Lexington.

Naim, A. 1997. Analysis of The Use of Accounting Product Costs In Oligopolistic Pricing Decisions. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, 12 (Oktober) 43-50.

Porcano, T.M. 1984a. Distructive Justice and Tax Policy. *The Accounting Review*, 59 (October) : 619-636.

\_\_\_\_\_, 1984b. The Perceived Effects of Tax Policy on Corporate Investment Intentions. *The Journal of the American Taxation Association* 6 (Fall) : 7-19.

Pyndyk, R.S. dan D.L. Rubinfeld. 1987. *Econometric Models & Economic Forecast*, 3<sup>rd</sup> ed., NY : McGraw-Hill Publishing, Inc.
11. Artikel diserahkan dalam bentuk cd dan empat eksemplar cetakan.



## DAFTAR ISI

Keterangan	Halaman
Editorial Staff Jurnal Riset Akuntansi	i
Kebijakan Editorial	iii
Pedoman Penulisan Artikel	v
Daftar isi	vii
1. <b>PENGENDALIAN SISTEM MATERIAL HANDLING PADA INDUSTRI MANUFAKTUR MODERN</b> Ning W.	1
2. <b>PENGARUH MANAJEMEN ASET TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN DAN KOTA DI JAWA BARAT</b> Ony Widilestariningtyas Ginjar	8
3. <b>PENGARUH EFEKTIFITAS PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD PADA TELKOM FOUNDATION</b> Fitroh Nurani Evi Octavia	19
4. <b>ANALISIS CAPITAL ADEQUACY RATIO (CAR) PENGARUHNYA TERHADAP KREDIT YANG DIBERIKAN (STUDI KASUS PADA PT. BANK PERMATA TBK. YANG TERDAFTAR DI BEI)</b> Wati Aris Astuti Noneng	30
5. <b>ANALISIS TERHADAP SURAT TAGIHAN PAJAK DAN PENERIMAAN PAJAK PADA KPP PRATAMA BANDUNG TAHUN 2009-2013</b> Adeh Ratna Komala Dewi Eka Apriliyani S.	41
6. <b>POLA KEMITRAAN DAN PRODUK PEMBIAYAAN SYARIAH USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH SEKTOR AGRIBISNIS.</b> Sri Dewi Anggadini	54

**PENGARUH MANAJEMEN ASET TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH  
PEMERINTAH KABUPATEN DAN KOTA DI JAWA BARAT**

**THE INFLUENCE OF ASSET MANAGEMENT ON LOCAL OWN-SOURCE REVENUE  
AT THE LOCAL GOVERNMENT IN WEST JAVA**

Oleh:

Ony Widilestariningtyas<sup>1)</sup> Ginanjar<sup>2)</sup>

[onykulestari@yahoo.com](mailto:onykulestari@yahoo.com)<sup>1)</sup>, [ginanjargooner@gmail.com](mailto:ginanjargooner@gmail.com)<sup>2)</sup>

Accounting Department, Faculty of Economic and Business  
Universitas Komputer Indonesia

**ABSTRACT**

*Conducted in the local cities and district government in West Java this research was took on 2014 period. The phenomenon encountered in the field is the embodiment of autonomy in the form of asset management that gave a less improvement to the local own-source revenue.*

*The objective of this study is to determine how much influence of the asset management on local own-source revenue Cities and District Local Government in West Java.*

*Research method that used in this research were descriptive and verification method with statistical testing using Simple Linier Regression with secondary data. Sampling method used is to take all of population called census.*

*The results showed that asset management has a significant effect on the local own-source revenue with a positive direction, that mean the higher asset management point, the higher local own-source revenue will be. Then The strength of the relationship was indicated as high correlation.*

**Key words : Asset Management, Local Own-Source Revenue.**

**1. PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang**

Sejak adanya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang diubah dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008, Pemerintah Pusat mendesentralisasikan sebagian urusan pemerintahan kepada Pemerintah Daerah. Salah satu dampak dari desentralisasi adalah adanya perubahan dalam pembagian alokasi keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Krisindarto, 2012). Kewenangan yang lebih luas memberikan peluang bagi daerah untuk meningkatkan kinerja keuangan dan mengoptimalkan potensi lokalnya, sehingga pada gilirannya kemampuan keuangan daerah menjadi lebih baik, daerah menjadi lebih mandiri, dan ketergantungan kepada pemerintah pusat menjadi semakin kecil (Tamboto et al., 2014).

Kewenangan yang diberikan berkaitan pula dengan bagaimana pemerintah daerah mampu memaksimalkan kekayaan daerah yang dimiliki misalnya melalui pengelolaan manajemen aset (Jusmin, 2013). Pengelolaan aset daerah harus ditangani dengan baik agar aset tersebut dapat menjadi modal awal bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengembangan kemampuan keuangannya. Aset jika tidak dikelola dengan semestinya, aset tersebut justru menjadi beban biaya karena sebagian dari aset membutuhkan biaya perawatan atau pemeliharaan dan juga turun nilainya atau terdepresiasi seiring waktu (Veronika & Tangkuman, 2014). Pentingnya manajemen aset secara tepat dan berdayaguna, dengan didasari prinsip pengelolaan yang efisien dan efektif, diharapkan akan memberi kekuatan terhadap kemampuan

pemerintah dalam membiayai pembangunan daerahnya yang tercermin dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Aira, 2014).

Adapun kondisi di lapangan yang diperoleh, Pada Mei 2014, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Jawa Barat melaporkan kurang efektifnya pengelolaan aset Pemkot Bandung, Pemerintah Kota Bandung memiliki aset berupa tanah dan bangunan yang bermasalah senilai Rp. 3,6 triliun karena luasannya tidak diketahui atau sertifikasinya tidak jelas (Cornell Syarief, 2014). Aset senilai Rp 3,6 triliun yang tidak dilengkapi luasannya itu merupakan bagian dari aset senilai Rp 4 triliun yang tidak didukung oleh informasi memadai, selain tidak mencantumkan luasan, aset-aset tersebut juga ada yang tidak disertai alamat serta tidak disertai alamat dan luasan (Cornell Syarief, 2014). Nilai aset yang tak beralamat mencapai Rp 185,5 miliar. Jadi, ada aset yang dicatat, tetapi masih harus dicari gedung dan lahannya di mana.

Permasalahan manajemen aset lainnya yaitu mengenai legalitas kepemilikan aset, kepala DPKAD Kota Bandung menyatakan pada Desember 2013 terhitung kurang lebih 90% aset Kota Bandung belum tersertifikasi di antaranya terdapat pada bangunan-bangunan peninggalan Belanda, daerah perluasan dan daerah otonomi kota. Pemkot Bandung kesulitan memperoleh hak kepemilikan bangunan peninggalan Belanda karena bukti kepemilikannya sulit ditelusuri, Siapa yang menguasai fisik, itu yang diprioritaskan (Ahmad Rekotomo, 2013). Padahal dengan aset yang dimiliki, Kota Bandung seharusnya bisa lebih mengoptimalkan asetnya tersebut. Menurut Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung, Aset yang dimiliki sangat potensial untuk bisa dimaksimalkan dalam pengertian untuk bisa memenuhi kebutuhan fiskal kita dalam menata Kota Bandung baik infrastruktur, ekonomi maupun sosial (Edi Siswadi, 2010).

### **1.1. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi manajemen aset pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Barat.
2. Seberapa Besar Pengaruh Manajemen Aset Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Barat.

### **1.2. Maksud dan Tujuan Penelitian**

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memahami teori-teori yang didapat dalam data dan/atau informasi yang diperoleh serta mengetahui bagaimana implementasi kegiatan manajemen aset yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Barat dapat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Implementasi manajemen aset pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh manajemen aset terhadap pendapatan asli daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Barat.

### **1.3. Kegunaan Penelitian**

#### **1.3.1. Kegunaan Praktis**

1. Melalui hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat memecahkan masalah yang terjadi pada proses implementasi manajemen aset daerah. Berdasarkan teori dan bukti empiris yang dihasilkan, maka fenomena kurang maksimalnya pendapatan asli daerah karena kurang baiknya pengelolaan aset daerah bisa diperbaiki.

2. Hasil penelitian diharapkan bisa menjadi sumbangsih pemikiran yang bermanfaat bagi pelaksanaan manajemen aset baik itu untuk organisasi pemerintahan maupun organisasi lainnya.

### 1.3.2. Kegunaan Akademis

Bagi akademis, penelitian ini diharapkan bisa menjadi pengembangan ilmu di bidang akuntansi sektor publik serta untuk menemukan masalah baru serta pemecahannya mengenai manajemen aset pada sektor pemerintahan.

## 2. Kajian Pustaka, Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

### 2.1. Kajian Pustaka

#### 2.1.1. Manajemen Aset

Menurut Olga Kaganova & Mihaly Kopanyi dalam Catherine Farvacque-Vitkovic & Mihaly Kopanyi (2014:276), manajemen aset pemerintah daerah adalah:

*“Municipal asset management is a process of making decisions and implementing them regarding operating, maintaining, refurbishing, acquiring, or developing physical assets cost-effectively, with the ultimate objective of providing the best possible service to local citizen.”*

Menurut Siregar (2004:518) menyebutkan bahwa tahapan kerja manajemen aset dibagi dalam lima tahap kerja yang saling berhubungan dan terintegrasi satu dengan lainnya, yaitu Inventarisasi, Legal Audit, Penilaian, Optimalisasi Aset dan Pengawasan & Pengendalian. Dengan membandingkan total aset yang dimiliki dengan jumlah pengelolaan aset yang kurang memadai hasil dari pemeriksaan BPK RI berupa permasalahan-permasalahan Inventarisasi, Legal Audit, Penilaian, Optimalisasi Aset dan Pengawasan & Pengendalian akan terlihat seberapa besar aset yang sudah dikelola dengan memadai.

#### 2.1.2. Pendapatan Asli Daerah

Menurut Halim & Kusufi (2012:101) menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.

Dalam Ahman & Indriani (2007:46), menjelaskan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

## 2.2. Kerangka Pemikiran

Hubungan antara manajemen aset terhadap pendapatan asli daerah dijelaskan dalam Olga Kaganova & Mihaly Kopanyi dalam Catherine Farvacque-Vitkovic & Mihaly Kopanyi (2014:280). Dijelaskan sebagai berikut:

*“no municipality would exist or survive without a sufficient portfolio of assets, which it needs to fulfill its various vital functions. The main reasons why managing assets should be central to local governments are ... source of revenue, Government property and asset can be a major source of revenues, whether one-time, as a sale of surplus property, or recurrent, including leasing land and commercial properties or granting concessions for operating municipal parking lots.”*

Paradigma pada penelitian ini adalah sebagai berikut:



### 2.3. Hipotesis

H = Managemen Aset berpengaruh nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah

## 3. Metodologi Penelitian

### 3.1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Dengan menggunakan metode penelitian akan diketahui hubungan signifikansi antara variabel yang diteliti sehingga kesimpulan yang akan memperjelas gambaran mengenai objek yang diteliti.

Metode deskriptif dan verifikatif bertujuan untuk menggambarkan benar atau tidaknya fakta-fakta yang ada serta menjelaskan tentang hubungan antara variabel yang diteliti dengan cara menumpulkan data, mengolah, menganalisis, dan menginterpretasikan data dalam pengujian hipotesis.

Metode pengujian data yang digunakan adalah analisis linier sederhana, analisis ini digunakan untuk mencari hubungan secara linear antara satu variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y), atau dalam artian ada variabel yang mempengaruhi dan ada variabel yang dipengaruhi. Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa LHP LKPD (Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) Kabupaten dan Kota di Jawa Barat tahun anggaran 2014, dengan mengambil sampel sensus atau jenuh yaitu mengambil pengambilan sampel dari semua anggota populasi, yaitu 27 LHP LKPD Kabupaten dan Kota di Jawa Barat.

### 3.2. Operasionalisasi Variabel

Variabel	Konsep Variabel	Indikator	Skala
Manajemen Aset (X)	<i>Municipal asset management is a process of making decisions and implementing them regarding operating, maintaining, refurbishing, acquiring, or developing physical assets cost-effectively, with the ultimate objective of providing the best possible service to local citizens.</i> (Farvacque-Vitkovic & Mihaly Kopanyi .2014:276)	Inventarisasi Legal audit Penilaian Optimalisasi aset Pengawasan dan pengendalian  Siregar (2004:518)	Rasio
Pendapatan Asli Daerah (Y)	Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. (Halim & Kusufi, 2012:101)	Realisasi Pendapatan Asli Daerah  (Halim & Kusufi, 2012)	Rasio

### 3.3. Teknik Pengumpulan Data

1. Penelitian lapangan
  - a Pengamatan (*Observation*)
  - b Dokumentasi (*Documentation*)
2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

### 3.4. Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini adalah LHP LKPD (Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) BPK RI Perwakilan Jawa Barat untuk seluruh Kabupaten dan Kota di Jawa Barat.

## 4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 4.1. Hasil Penelitian

#### 4.1.1. Hasil Analisis Deskriptif

##### 4.1.1.1. Hasil Analisis Deskriptif Manajemen Aset

#### Implementasi Manajemen Aset TA 2014 27 Pemerintah Daerah di Jawa Barat

No.	Instansi	Hasil Pengelolaan Aset yang Kurang Memadai (Rp.)	Total Aset (Rp.)	Aset Yang Dikelola dengan Memadai
1	Kabupaten Bandung	146,131,023,943.00	8.866.342.222.287,58	98.35%

No.	Instansi	Hasil Pengelolaan Aset yang Kurang Memadai (Rp.)	Total Aset (Rp.)	Aset Yang Dikelola dengan Memadai
2	Kabupaten Bandung Barat	1,946,634,006,772.00	4.623.427.540.393,34	57.90%
3	Kabupaten Bekasi	2,152,522,585,722.00	11.945.826.702.258,90	81.98%
4	Kabupaten Bogor	135,739,013,234.69	18.168.758.328.991,00	99.25%
5	Kabupaten Ciamis	998,651,064,038.33	3.579.137.338.463,73	72.10%
6	Kabupaten Cianjur	556,085,142,220.00	5.019.727.453.814,68	88.92%
7	Kabupaten Cirebon	116,668,518,559.27	3.881.890.021.889,73	96.99%
8	Kabupaten Garut	552,227,303,016.00	3.966.764.515.560,68	86.08%
9	Kabupaten Indramayu	2,698,894,767,015.00	4.604.394.610.965,58	41.38%
10	Kabupaten Karawang	951,801,752,983.11	5.592.497.171.595,24	82.98%
11	Kabupaten Kuningan	1,530,259,114,338.01	2.363.359.345.752,52	35.25%
12	Kabupaten Majalengka	519,123,404,326.08	4.145.928.277.813,08	87.48%
13	Kabupaten Pangandaran	60,255,534,572.00	1.353.819.507.370,28	95.55%
14	Kabupaten Purwakarta	270,415,580,426.00	2.238.401.002.560,49	87.92%
15	Kabupaten Subang	784,295,637,162.00	4.474.138.024.624,32	82.47%
16	Kabupaten Sukabumi	32,474,272,410.00	4.650.491.921.373,21	99.30%
17	Kabupaten Sumedang	48,054,864,425.45	3.107.278.084.406,45	98.45%
18	Kabupaten Tasikmalaya	11,778,351,971.00	4.287.140.779.583,76	99.73%
19	Kota Bandung	22,000,028,099,513.50	25.247.736.636.747,00	12.86%
20	Kota Banjar	2,531,233,954.02	1.719.988.056.191,40	99.85%
21	Kota Bekasi	1,149,984,574,118.00	7.776.755.170.073,43	85.21%
22	Kota Bogor	238,942,372,024.28	6.263.429.999.065,65	96.19%
23	Kota Cimahi	5,081,010,019.00	2.218.543.225.767,84	99.77%
24	Kota Cirebon	236,016,407,420.00	3.373.856.254.013,82	93.00%
25	Kota Depok		8.198.084.298.261,30	100.00%
26	Kota Sukabumi	240,991,716.00	1.962.304.218.698,00	99.99%
27	Kota Tasikmalaya	55,412,726,221.00	3.799.596.475.799,70	98.54%
			<b>Rata-rata</b>	<b>84.35%</b>

Sumber: LHP LKPD Pemerintah Daerah (Data Telah Diolah)

Manajemen aset yang dilakukan oleh pemerintah daerah, merupakan kegiatan pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah

daerah dituntut untuk bisa seefektif dan seefisien mungkin dalam mengelola aset atau barang milik daerah.

Dengan membandingkan hasil pemeriksaan BPK RI mengenai jumlah aset yang dikelola kurang memadai dengan total aset yang dimiliki suatu pemda dapat dilihat seberapa besar aset yang telah dikelola dengan memadai. Dari hasil penelitian dari 27 Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Barat terdapat 4 Pemerintah Daerah yang memiliki jumlah aset yang dikelola dengan memadainya paling rendah atau dengan kata lain memiliki banyak aset yang bermasalah, yaitu antara lain Kab. Bandung Barat (57,90%), Kab. Indramayu (41,38%), Kab. Kuningan (35,25%) dan Kota Bandung (12,86%).

Pemda Kota Bandung memiliki paling banyak aset yang tidak dikelola dengan memadai, menurut laporan BPK RI Perwakilan Jawa Barat, Kota Bandung memiliki aset senilai Rp. 22.000.028.099.513,50 yang bermasalah. Permasalahan yang menjadi sorotan utama Pemkot Bandung yaitu masalah inventarisasi dan pencatatan nilai aset, banyak aset-aset milik Pemkot Bandung yang tidak dilengkapi dengan informasi yang jelas mulai dari informasi lokasi, luasan aset hingga masalah legalitas. Permasalahan pada pengelolaan aset yang banyak ini pula yang menjadi pertimbangan BPK tidak memberikan opini WTP untuk LKPD pemkot Bandung pada tahun anggaran 2014.

Sedangkan untuk Pemerintah Kota Depok dari total aset sebesar Rp. 8.198.084.298.261,30 BPK RI tidak menemukan permasalahan untuk pengelolaan aset. Hal ini juga tercermin pada opini BPK RI terhadap LKPD Kota Depok yang memberikan opini WTP untuk tahun anggaran 2014. Untuk pemerintah daerah lain yang memiliki jumlah aset bermasalah dengan jumlah yang kecil yaitu Pemkab Sukabumi, Pemkab Sumedang, Pemkab Tasikmalaya, Kota Cimahi dan Kota Sukabumi juga mendapatkan opini WTP untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerahnya. Manajemen aset merupakan salah satu poin penting penilaian dalam Sistem Pengendalian Internal (SPI).

#### 4.1.1.2. Hasil Analisis Deskriptif Pendapatan Asli Daerah

**Pendapatan Asli Daerah TA 2014  
27 Pemerintah Daerah di Jawa Barat**

No.	Instansi	Anggaran	Realisasi	%
1	Kabupaten Bandung	583.782.229.947,58	702.045.372.759,08	102,33
2	Kabupaten Bandung Barat	254.795.835.592,00	248.697.185.722,70	101,18
3	Kabupaten Bekasi	1.290.412.792.982,00	1.547.787.549.382,00	119,94
4	Kabupaten Bogor	1.481.027.789.000,00	1.712.937.376.136,16	115,66
5	Kabupaten Ciamis	161.636.566.519,00	182.320.228.014,00	112,80
6	Kabupaten Cianjur	385.119.931.061,60	411.538.567.542,95	106,86
7	Kabupaten Cirebon	424.593.340.403,00	452.870.109.028,00	106,66
8	Kabupaten Garut	324.329.660.481,00	373.261.713.306,00	115,09
9	Kabupaten Indramayu	284.472.232.000,00	328.116.166.964,00	115,34
10	Kabupaten Karawang	836.464.055.855,00	909.158.490.944,00	108,69
11	Kabupaten Kuningan	185.714.311.741,00	202.517.821.129,00	109,05
12	Kabupaten Majalengka	198.122.446.078,00	223.120.890.621,00	112,62
13	Kabupaten Pangandaran	46.323.540.943,00	32.473.188.880,00	70,10
14	Kabupaten Purwakarta	459.349.229.156,00	293.833.261.345,00	63,97
15	Kabupaten Subang	206.423.025.875,00	262.614.860.828,00	127,22

No.	Instansi	Anggaran	Realisasi	%
16	Kabupaten Sukabumi	411.643.077.000,00	457.059.973.434,86	111,03
17	Kabupaten Sumedang	260.719.911.434,66	301.900.842.760,30	115,76
18	Kabupaten Tasikmalaya	152.337.814.551,00	154.255.170.573,00	101,26
19	Kota Bandung	1.808.509.055.075,00	1.716.057.298.378,00	94,89
20	Kota Banjar	103.638.432.277,00	118.592.601.620,00	114,43
21	Kota Bekasi	1.170.134.918.800,00	1.205.265.728.279,55	103,00
22	Kota Bogor	483.014.420.704,00	544.835.708.254,00	112,80
23	Kota Cimahi	207.829.160.605,95	227.949.120.180,56	109,68
24	Kota Cirebon	265.668.901.051,00	298.540.660.324,00	112,37
25	Kota Depok	638.584.271.255,45	659.173.522.492,23	103,22
26	Kota Sukabumi	244.768.896.910,00	258.467.192.313,00	105,60
27	Kota Tasikmalaya	230.647.636.948,00	253.450.505.778,21	109,89

Sumber: LHP LKPD Pemerintah Daerah

Dilihat dari tingkat realisasi yang telah dicapai tiap-tiap pemkab dan pemkot di atas, hampir semua telah mencapai tingkat realisasi dari target yang telah dianggarkan. Dan ada 3 Pemda yang tidak mencapai tingkat realisasi PAD 100% yaitu Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Purwakarta dan Kota Bandung.

Kabupaten Purwakarta yang memiliki tingkat realisasi PAD paling rendah yaitu hanya sebesar 63,97%, dikarenakan masih banyak piutang yang belum tertagih atau belum terealisasi oleh Pemkab Purwakarta.. Sedangkan untuk Pemkab Pangandaran yang merupakan Daerah Otonom Baru, Realisasi PAD sebesar 70,10% masih dirasa cukup baik. Karena target dari sumber-sumber yang menjadi unggulan Kabupaten Pangandaran dari Pajak Hotel dan Restoran di wilayah-wilayah wisata telah melebihi target yang ditetapkan. Seperti dari pajak hotel di wilayah objek wisata pantai Pangandaran.

#### 4.1.2. Hasil Analisis Verifikatif

Hasil analisis verifikatif Regresi Linier Sederhana dengan menggunakan program IBM SPSS Statistics v.23 mengenai pengaruh manajemen aset terhadap pendapatan asli daerah 27 Kabupaten dan Kota di Jawa Barat adalah sebagai berikut:

1. Nilai Koefisien Korelasi yang diperoleh antara manajemen aset (X) dan pendapatan asli daerah(Y) adalah 0.725 dengan arah hubungan positif. Keeratan korelasinya termasuk kategori erat/kuat karena berada pada interval 0.60-0.799. Arah hubungan positif menunjukkan jika implementasi manajemen aset dilakukan dengan baik maka penerimaan pendapatan asli daerah pun akan baik pula
2. Nilai koefisien determinasi antara manajemen aset (X) dan pendapatan asli daerah (Y) adalah 52,5%. Artinya manajemen aset memberikan kontribusi kepada pendapatan asli daerah sebesar 52,5% atau dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah dipengaruhi oleh manajemen aset sebesar 52,5% sedangkan sisanya merupakan pengaruh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
3. Persamaan regresi yang dapat diperoleh adalah:

$$Y=a+bX$$

$$Y= 80.550.000.000+0,099X$$

Koefisien b dinamakan koefisien arah regresi dan menyatakan perubahan rata-rata variabel Y untuk setiap perubahan variabel X sebesar satu satuan. Perubahan ini merupakan pertambahan bila b bertanda positif dan penurunan bila b bertanda negative. Persamaan tersebut dapat diterjemahkan sebagai berikut:

- Konstanta sebesar 80.550.000.000 menyatakan bahwa jika tidak ada nilai manajemen aset maka nilai partisipasi sebesar 80.550.000.000.
- Koefisien regresi X sebesar 0,099 menyatakan bahwa setiap pertambahan 1 nilai manajemen aset, maka nilai partisipasi bertambah sebesar 0.099.

#### 4. Pengujian hipotesis

- $H_0$  : Manajemen aset tidak berpengaruh nyata (signifikan) terhadap pendapatan asli daerah.
- $H_1$  : Manajemen aset berpengaruh nyata (signifikan) terhadap pendapatan asli daerah.

Dari hasil output pengujian diketahui nilai  $t_{hitung} = 5,529$  dengan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, yang berarti ada pengaruh yang nyata (signifikan) variabel manajemen aset terhadap variabel pendapatan asli daerah.

## 4.2. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui nilai Koefisien Korelasi yang diperoleh antara manajemen aset (X) dan pendapatan asli daerah (Y) adalah 0.725 dengan arah hubungan positif. Keeratannya termasuk kategori erat/kuat karena berada pada interval 0.60-0.799. Arah hubungan positif menunjukkan jika implementasi manajemen aset dilakukan dengan baik maka penerimaan pendapatan asli daerah pun akan baik pula. Besar kontribusi yang diberikan oleh manajemen aset terhadap pendapatan asli daerah adalah sebesar 52,5%, sedangkan sisanya sebesar 47,5% merupakan faktor lain yang tidak diteliti. Dari hasil output pengujian diketahui nilai  $t_{hitung} = 5,529$  dengan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, yang berarti ada pengaruh yang nyata (signifikan) variabel manajemen aset terhadap variabel pendapatan asli daerah.

Pengaruh manajemen aset terhadap pendapatan asli daerah ini menjelaskan teori dari Olga Kaganova & Mihaly Kopanyi dalam buku *Municipal Finance* (2014:280), yang mengemukakan bahwa *no municipality would exist or survive without a sufficient portfolio of assets, which it needs to fulfill its various vital functions*. Dijelaskan pula mengapa manajemen aset sangat sentral bagi pemerintah daerah salah satu alasannya yaitu sebagai *source of revenue, Government property and asset can be a major source of revenues, whether one-time, as a sale of surplus property, or recurrent, including leasing land and commercial properties or granting concessions for operating municipal parking lots*.

Pengaruh positif manajemen aset terhadap pendapatan asli daerah ini juga menguatkan fenomena yang dikemukakan sebelumnya pada salah satu Pemda di Jawa Barat yaitu Pemkot Bandung yang memiliki total aset bermasalah senilai Rp. 4 triliun karena masalah informasi aset yang kurang memadai, lalu sekitar 90% aset kota bermasalah karena legalitas, bahkan bila dilihat dari jumlah aset yang dikelola kurang memadai hasil pemeriksaan BPK melalui LHP-nya ada sekitar 87% aset yang dikelola kurang memadai. Permasalahan yang menjadi sorotan utama Pemkot Bandung yaitu masalah inventarisasi dan pencatatan nilai aset, banyak aset-aset milik Pemkot Bandung yang tidak dilengkapi dengan informasi yang jelas mulai dari informasi lokasi, luasan aset hingga masalah legalitas. Banyaknya permasalahan pengelolaan aset ini berimbas pada realisasi pendapatan asli daerah Pemkot Bandung yang termasuk ke dalam 3 dari 27 Pemkab dan Pemkot yang ada di Jawa Barat, yang tidak mencapai tingkat realisasi 100% pada tahun anggaran 2014.

## 5. Kesimpulan dan Saran

### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan serta pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan guna menjawab rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, sebagai berikut:

1. Implementasi manajemen aset pada 27 Kabupaten dan Kota di Jawa Barat tahun anggaran 2014 jika dilihat dari rata-rata jumlah aset yang dikelola dengan memadai, maka bisa dikatakan tinggi yaitu 84,5% telah dikelola dengan memadai. Meskipun demikian, hal tersebut tidak bisa dikatakan baik karena dari 27 entitas hanya 1 yang tidak mendapat sorotan khusus mengenai permasalahan pengelolaan/manajemen aset oleh BPK RI dalam laporan hasil pemeriksaannya, yaitu Pemkot Depok. Dari 27 entitas Pemerintah Daerah yang memiliki jumlah aset yang dikelola dengan memadainya paling rendah atau dengan kata lain memiliki banyak aset yang bermasalah, yaitu antara lain Kab. Bandung Barat (57,90%), Kab. Indramayu (41,38%), Kab. Kuningan (35,25%) dan Kota Bandung (12,86%).
2. Manajemen aset berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah dengan arah hubungan positif, artinya semakin baik implementasi manajemen aset yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah di Jawa Barat maka akan membuat pendapatan asli daerah baik atau meningkat. Besar kontribusi yang diberikan oleh manajemen aset terhadap pendapatan asli daerah adalah sebesar 52,5%, sedangkan sisanya sebesar 47,5% merupakan faktor lain yang tidak diteliti. Nilai Koefisien Korelasi yang diperoleh adalah 0,725, Keeratan korelasinya termasuk kategori erat/kuat. Persamaan regresi yang dapat diperoleh adalah  $Y=80.550.000.000+0,099X$  artinya:
  - Konstanta sebesar 80.550.000.000 menyatakan bahwa jika tidak ada nilai manajemen aset maka nilai partisipasi sebesar 80.550.000.000.
  - Koefisien regresi X sebesar 0,099 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 nilai manajemen aset, maka nilai partisipasi bertambah sebesar 0,099.

### 5.2. Saran

#### 5.2.1. Saran Praktis

Dalam implementasi kegiatan manajemen aset pada pemerintah daerah di Jawa Barat, hendaknya masing-masing Pemerintah Daerah melakukan koordinasi secara terus-menerus dalam menindaklanjuti permasalahan pengelolaan aset daerah, terutama rekomendasi dari BPK RI. Rekomendasi BPK merupakan hasil dari penelaahan dan pemeriksaan secara menyeluruh, dengan menindaklanjuti secara bertahap rekomendasi dari BPK, perlahan masalah-masalah manajemen aset yang dimiliki akan berkurang.

#### 5.2.2. Saran Akademis bagi penelitian selanjutnya

Bagi Peneliti Selanjutnya agar dapat menggunakan faktor-faktor internal lainnya yang kemungkinan mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah selain Manajemen Aset dan Pemanfaatan aset Daerah seperti Pajak Daerah, Belanja Daerah dan lainnya. Selain itu dapat menggunakan faktor-faktor eksternal yang kemungkinan mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah seperti Rasio Kemandirian daerah, inflasi, pertumbuhan ekonomi Indonesia dan lainnya.

**Daftar Pustaka**

- Abdul Halim & Syam Kusufi. 2012. *Akuntansi Sektor Publik: Teori, Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Agung Krisindarto. 2012. *Pengelolaan Aset Tanah Milik Pemerintah Kota Semarang*. Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota. Volume 8 (4); 403-411.
- Aras Aira. 2014. *Peran Manajemen Aset Dalam Pembangunan Daerah*. Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan. Volume 17 (1); 21-39.
- Catherine Farvacque-Vitkovic & Mihaly Kopanyi. 2014. *Municipal Finance*. Washington DC: The World Bank
- Eeng Ahman & Epi Indriani. 2007. *Ekonomi dan Akuntansi: Membina Kompetensi Ekonomi*. Bandung: PT Grafindo Media Pratama.
- Jusmin. 2013. *Pengaruh Manajemen Aset Terhadap Tingkat Optimalisasi Aset Tetap (Tanah dan Bangunan) Pemerintah Kota Baubau*. Tesis. Yogyakarta: Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gajah Mada.
- Mulalinda, Veronika & S.J, Tangkuman. 2014. Efektifitas Penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi Aset Tetap Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sitiro. Jurnal EMBA. Volume 2 (1); 521-531.
- Siregar Doli. D, 2004, *Manajemen Aset: Strategi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan Secara Nasional dalam Konteks Kepala Daerah sebagai CEO's pada Era Globalisasi dan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Tamboto, Laedi., Jenny, M., Mawikere, L. 2014. *Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dalam Masa Otonomi Daerah Pada Kupaten Minahasa Tenggara*. Jurnal EMBA. Volume 2 (2); 755-767.